

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas terkait implementasi program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Surabaya guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada tujuan kedua Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan pada program GPM di Kota Surabaya cukup terpenuhi dikarenakan tujuan program telah sesuai dengan dengan petunjuk teknis dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat serta cukup berhasil meredam kenaikan harga sesuai tren harga pangan. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek penegasan sasaran agar manfaat dapat dirasakan secara lebih merata dan belum adanya peraturan daerah khusus GPM. Sehingga, dalam hal ini tujuan saja belum cukup, melainkan perlu diikuti dengan pengaturan sasaran yang lebih spesifik. Selain itu, belum adanya peraturan daerah yang mengatur petunjuk teknis resmi perlu dikaji kembali.
2. Sumber daya pada program GPM di Kota Surabaya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan komoditas, hingga dukungan anggaran yang dilaksanakan melalui kolaborasi ini sudah cukup baik, yang

mana sumber daya manusia sudah dianggap mampu dan mencukupi; sarana dan prasarana yang secara umum sudah tercukupi, namun masih terdapat kekurangan ketika kondisi sedang ramai lokasi dianggap kurang memadai; ketersediaan komoditas yang cukup memenuhi kebutuhan GPM, namun masih memiliki kekurangan karena bahan pokok cepat habis dan perlu ditambah kuantitasnya; serta dukungan anggaran yang tidak adanya alokasi khusus GPM namun melalui kolaborasi ini sudah cukup mendukung pelaksanaan program.

3. Kualitas hubungan interorganisasional dalam pelaksanaan program GPM ini sudah berjalan cukup baik, namun perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan melalui adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif antar instansi pelaksana, namun masih memiliki kekurangan pada koordinasi penyesuaian harga dengan penyedia; penggunaan media komunikasi yang cukup baik dalam penyebaran informasi, namun masih memiliki kekurangan pada penyebaran informasi yang dianggap belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat; serta kejelasan informasi mengenai pelaksanaan program GPM yang telah jelas dan baik.
4. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program GPM di Kota Surabaya menunjukkan kapasitas organisasi pelaksana yang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan berbagai instansi yang saling mendukung; pembagian tugas dan hierarki yang jelas; serta komunikasi dan kerja sama yang terjalin secara efektif antar pihak pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik pelaksanaan GPM di Kota Surabaya sudah mendukung pelaksanaan program GPM, di mana pada sisi ekonomi masyarakat Kota Surabaya memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik dan beragam mulai

dari kalangan menengah bawah hingga menengah atas, sehingga mendukung daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program GPM; kondisi sosial Surabaya juga kondusif dan tidak ditemukan hambatan sosial berarti selama pelaksanaan program; dari sisi politik program GPM dipandang sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat; faktor pendukung lain; Tingkat kebutuhan pangan yang tinggi; dukungan pihak lain yang tinggi; serta respon masyarakat yang positif adanya dukungan yang kuat untuk melaksanakan program GPM.

6. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi GPM sudah baik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari pemahaman pelaksana yang baik, adanya sikap penerimaan; komitmen pelaksana yang kuat; sikap pelayanan yang responsif; serta intensitas respon yang tinggi dalam menangani berbagai kendala di lapangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Surabaya telah cukup baik dan cukup berhasil. Hal ini didukung oleh terpenuhinya variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional yang cukup baik dan variabel karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana yang baik. Meskipun masih terdapat kekurangan pada sasaran yang bersifat terlalu umum, belum adanya peraturan daerah khusus GPM, kurang luasnya lokasi dan tempat, kuantitas komoditas pokok yang belum optimal, koordinasi penyesuaian harga yang belum optimal, dan penyebaran informasi yang belum menjangkau seluruh kalangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Sasaran program yang masih secara umum masyarakat Kota Surabaya ini masih perlu diperjelas, sehingga diharapkan dapat memperjelas sasaran program untuk meningkatkan efektivitas dampak GPM pada masyarakat Kota Surabaya khususnya masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meratakan manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan adanya stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Lokasi dan tempat pelaksanaan GPM yang dianggap masih belum memadai saat ramai pembeli ini, disarankan untuk mempertimbangkan lokasi yang lebih luas seperti di lapangan atau *GPM on the road* seperti yang dilaksanakan di Kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembeli agar masyarakat yang menerima manfaat dapat bertambah.
3. Ketersediaan komoditas bahan pokok yang dianggap masih belum optimal ini, disarankan untuk menambah kuantitas bahan pokok pada saat pelaksanaan GPM di Kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat dapat menerima manfaat program stabilisasi pasokan dan harga pangan ini.
4. Belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur petunjuk teknis GPM di Kota Surabaya ini perlu dipertimbangkan untuk memperkuat program Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan peraturan daerah Kota Surabaya sendiri. Hal ini bertujuan agar memudahkan koordinasi pelaksana dan pembuat kebijakan.

5. Masih adanya penyedia yang merasa dirugikan akibat penyesuaian harga komoditas, sehingga disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan penyedia khususnya untuk masalah harga yang harus digunakan sebelum acara berlangsung kepada semua penyedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyedia yang merasa keberatan dengan harga yang di bawah pasar atau merasa dirugikan.
6. Penyebaran informasi yang belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat ini, sehingga disarankan untuk melaksanakan penyebaran informasi dengan lebih luas melalui media luring seperti papan pengumuman dan pengeras suara. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki sosial media dan lansia masih bisa mengetahui adanya GPM.